

PERUBAHAN STRUKTUR GERAKAN PERLAWANAN PETANI RENGAS

Oleh:

Mohammad Syawaludin

(awalugm@yahoo.co.id)

Dosen Program Studi Politik Islam

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstracts:

Research study focuses on changes in the structure of the movement and its relation to the achievement of objectives of the struggle. Form of peasant movement Rengas to structure the resistance movement and the movement to change the structure in accordance with the environmental conditions encountered resistance. Through the analysis of periodic this research can parse the initial formation process of the development of the structure and expansion of the structure of the movement until the action changes the structure of the movement after he did a mass reclaiming. Methods of qualitative research approaches used for the case study approach, this type of approach was chosen because the more stressed the rationalism and the reality of the social, political, cultural. In addition the election method of the single case study is a research strategy that will help researchers investigate carefully a program, event, activity, process or a group of individuals. Cases where limited by time and the type of activities which the researchers were able to gather information in a complete and scalable.

Keywords : *conflict, contentious politic, social movement*

Pendahuluan

Konflik agraria antara petani dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, tidak sekedar bagian realitas konflik struktural yang bersumber dari kepentingan ekonomi dan pembangunan. Namun, ada kenyataan yang perlu diperjelas, yakni suatu kondisi pergeseran strategi perlawanan warga Rengas yang mengalami kondisi dinamis dan menunjukkan identitas baru bentuk perjuangan. Perseteruan yang terjadi sejak awal 1980-an ini memunculkan suatu rupa gerakan dan perlawanan modern dari para petani, yang bergerak dinamis mengikuti kebutuhan pengorganisiran.

Pada konflik di Ogan Ilir ini, terdapat tiga persoalan yang harus diperhatikan, yaitu: pendorong formasi gerakan, pembentuk dan penguatan struktur gerakan, dan

dinamika perubahan strategi struktur gerakan petani yang direpresentasikan oleh urgensi peran organisasi gerakan petani. Perhatian terhadap analisis peluang politik dan proses pemingkakan akan mempertajam analisis kondisi yang mendorong munculnya petani dalam bentuk gerakan massif yang lahir dari konflik agraria, meskipun sudah diketahui masyarakat selalu didalam kondisi yang dilemahkan.

Oleh karena itu, beberapa tahapan yang menjadi pembatasan bagaimana permasalahan gerakan petani ini akan dihadirkan ; perubahan struktur gerakan dari kelompok ke gerakan petani terorganisir adalah terkait dengan taktik pencapaian tujuan perjuangan. Tidak hanya sebagai wadah perjuangan petani yang tidak terlepas dari proses peranan dan kerja oleh para aktor gerakan yang terlibat. Selanjutnya gerakan petani dapat dilihat dari sisi bagaimana sumberdaya yang dimiliki kemudian dapat dimobilisasi, bagaimana ruang politik oleh para aktor gerakan dimaknai sebagai peluang atau ancaman, dan bagaimana makna situasi gerakan dapat dibangun dengan memanfaatkan narasi-narasi keyakinan yang ada. Selain itu, dinamika gerakan petani secara internal dapat dilihat sebagai jaringan antar aktor dan secara eksternal memungkinkan membentuk jaringan sosial lebih luas.

Konflik sebagai suatu yang inheren dalam sistem masyarakat, ini tak lepas dari fakta hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi dan diperebutkan sehingga menciptakan *steering problem*. Baginya konflik merupakan kondisi dominasi struktural, kelompok yang berada didalam struktur dengan berbagai perangkat kewenangan mampu mengarahkan berbagai bentuk kebijakan dan aturan main diluar struktur wewenang tersebut. Hal menarik lainnya adalah sering ditemukan *narasi-narasi Islam* dalam bentuk keyakinan yang umum dan menjadi pengikat solidaritas gerakan baik ke dalam maupun jaringan keluar.

Kajian tentang kekuasaan dan kewenangan yang bertemu dengan jaringan kepentingan-kepentingan ekonomi, kekuasaan, elite masyarakat, pengusaha dan sumber daya alam. Kontestasi ini didukung keberadaan sistem politik transisional yang menciptakan suatu kondisi jalinan hubungan kekuasaan yang didasari atas kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pelaku. Sering ditemukan adanya relasi saling memanfaatkan dan ketergantungan (interdependensi) yang secara terus menerus dipelihara, direproduksi, dan dimantapkan dalam kondisi ketegangan tersebut.

Politik perlawanan dimainkan peranannya sebagai bentuk memobilisasi gerakan perlawanan. Karenanya, untuk sampai pada gerakan perlawanan, maka upaya mobilisasi massa itu harus memperhatikan faktor kesempatan dan ancaman atau situasi ketegangan struktural (*repertoire of contention*). Seperti yang diutarakan oleh Charles Tilly dan Lesley Wood¹ bahwa perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan melalui berbagai ragam protes publik, termasuk tindakan-tindakan di luar jalur partisipasi politik formal yang diatur oleh hukum dan perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah yang signifikan.

Jalannya Konflik

Konflik agraria antara petani Rengas dengan PTPN VII Cinta Manis berlangsung sejak 1982, saat pemerintah membentuk PTPN VII Unit Cinta Manis berdasarkan Surat Menteri Pertanian (No.076/Mentan/1/1981 - 02 Februari 1981) perihal izin prinsip PT Cinta Manis di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Lamatang Ilir Ogan Tengah, Sumatera Selatan. Ditindaklanjuti dengan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II OKI nomor: PU.000/4117/1981 tanggal 27 Maret 1981 perihal Pencadangan Areal untuk perkebunan tebu dan seterusnya perolehan lahan berdasarkan SK Gubernur Sumsel No. 379/Kpts/I/1981 tanggal 16 November 1981, Perihal Pencadangan Tanah Negara Seluas + 20.000 ha untuk Proyek Pabrik Gula di Kecamatan Tanjungraja, Muarakuang, Inderalaya, dan Tanjungbatu, Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir.

Proses pembangunan PTPN VII Unit Cinta Manis ini dipaksakan oleh Pemerintah Orde Baru dengan menekan para petani dari 20 desa dan 6 kecamatan di Ogan Ilir untuk menyerahkan lahan mereka dijadikan perkebunan tebu. 20 Desa tersebut ialah desa Sribandung, Tanjung Laut, Tanjung Pinang, Tanjung Atap, Tanjung Baru Petai, Sentul, Limbang Jaya (Kecamatan Tanjung Batu). Desa Sri Kembang, Rengas, Lubuk Bandung (Kecamatan Payarman). Desa Ketiau, Betung, Payalengkung, Lubuk Keliat (Kecamatan Lubuk Keliat), dan Desa Meranjat I dan II, Meranjat Ilir (Kecamatan Indralaya Selatan). Lalu, Desa Tanjung Gelam, Tanjung Sejaroh, Tanjung

¹Charles Tilly and Lesley J. Wood, *Social Movements, 1768-2008*, USA: Paradigm Publishers, 2009.

Agung Sejaro Sakti (Kecamatan Indralaya Induk), serta Desa Sri Ngilam (Kecamatan Tanjung Raja).²

Tanah yang selama puluhan tahun digarap sebagai ladang warga, diambil alih oleh PTPN VII untuk ditanami tebu guna memasok Pabrik Gula Cinta Manis. Tindakan Orde Baru ini merupakan satu dari sekian banyak penyerobotan lahan oleh negara dan korporasi, yang dibarengi dengan tindakan-tindakan intimidasi dan kekerasan. Besaran kompensasi ganti rugi tanah pun tidak transparan dan nominalnya yang sungguh dirasa tidak adil. Lahan warga saat itu hanya diberi ganti rugi sebesar Rp. 150.000 per hektare atau Rp. 15,- per meter persegi.

Di awal sengketa, para petani proses gugatan terhadap pemerintah secara terbuka hanya dilakukan secara individu dan kelompok-kelompok kecil petani. Begitu represifnya pemerintah Orde Baru melalui otoritas militer setempat dapat menekan riak-riak perlawanan petani agar tidak meluas dan tuntutan-tuntutan perdata hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Hak Tanah. Meskipun demikian, ketidakpuasan masyarakat ini tetap memercikan gesekan-gesekan kecil antara petani dengan PTPN VII apalagi wilayah operasi BUMN tersebut jauh lebih luas dari Hak Guna Usaha sesuai yang tercantum pada perjanjian awal.

Serangkaian peristiwa gesekan dan pengancaman yang dilakukan oleh pihak PTPN maupun aparat militer menjadi *enterpoin mobilisasi struktural*. Prakondisi sumberdaya potensial lokal sebagai *framing processes*, terjadi pada saat beberapa orang warga desa yang tidak puas dan merasa memiliki hak atas lahan terus berjuang dan menempuh jalur hukum. Perjuangan jalur hukum dengan menguasai ke pengacara salah satunya membuahkan hasil, yakni dengan ditetapkannya 40,725 Ha lahan warga atas nama keluarga almarhum Jakfar yang sudah *incracht* melalui putusan Mahkamah Agung tahun 1994 dan dinyatakan sah milik warga dengan ganti rugi.

Perlawanan petani Rengas dilakukan secara individual dan kelompok-kelompok lokal yang ada serta dibantu oleh organisasi pemerintah desa, seperti: LKMD, *Pesirah* dan *Kerio*. Dukungan dari organisasi pemerintahan desa pada saat itu dapat terjadi karena kepala desa dan para pembantunya sejak dari awal menolak keberadaan PTPN VII di Rengas dan mayoritas petani yang berjuang menuntut pengembalian lahan

²<http://www.mongabay.co.id/2012/07/17/petani-ogan-ilir-polisi-bentrok-diduga-ada-skenario>. Diakses pada 8 April 2016.

berasal dari Desa Rengas. Di sini sudah tampak ruang mobilisasi massa yakni unsur dukungan dari organisasi meskipun masih sangat terbatas. Fungsi keorganisasian inilah akan berperan dan berkembang sendiri mencari dan memperbesar dukungan diluar masyarakat petani itu sendiri.

Penelitian di lapangan menemukan bahwa ada gerakan dari warga, petani dan keluarga petani yang berhimpun dalam suatu kelompok terbatas. Tujuan kelompok-kelompok tersebut adalah melakukan kegiatan perlawanan dan pertahanan atas lahan yang diambil oleh PTPN VII dengan cara menanam dan menjaga lahan tersebut secara individual atau keluarga. Kelompok-kelompok terdiksi dengan nama kelompok petani keluarga 171, 111 dan 60 serta kelompok petani Rengas yang berusaha berjuang secara bersama-sama menuntut pengembalian lahan dari PTPN VII Cinta Manis, meskipun dalam ranah yang masih sangat terbatas. Kelompok-kelompok ini terus-menerus melakukan kegiatan perlawanan baik secara individual maupun kelompok. Secara individual perlawanan sering dilakukan dengan cara merusak irigasi air, mempertahankan tanah sengketa yang berada di dekat perkebunan masyarakat. Sementara secara kelompok aktifitas perlawanan dilakukan dengan cara menutup akses jalan ke perkebunan tebu, demonstrasi ke kabupaten atau menduduki lahan sengketa tanpa merusak perkebunan tebu.

Momentum kebangkitan secara terbuka dan cukup mempengaruhi kesolidan petani dipicu oleh peristiwa konfrontasi berdarah antara petani dan aparat Brimob pada 4 Desember 2009.³ Bentrokan terjadi diawali oleh penertiban yang dilakukan oleh aparat Brimob dengan membongkar pondok-pondok petani di areal tanah sengketa, hal ini spontan memicu kemarahan para petani. Pada peristiwa tersebut aparat Brimob melakukan penembakan ke arah warga sehingga menyebabkan 12 petani mengalami luka tembak. Pasca peristiwa tersebut, para petani Rengas membentuk serikat petani dan mulai membangun perlawanan kolektif secara lebih terorganisir. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan advokasi legal mulai masif masuk membantu para

³Kajian tentang kekuasaan dan kewenangan yang bertemu dengan jaringan kepentingan-kepentingan ekonomi, kekuasaan, elite masyarakat, pengusaha dan sumber daya alam didukung keberadaan sistem politik transisional justru menciptakan suatu kondisi jalinan hubungan kekuasaan yang didasari atas kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pelaku dan ini merupakan relasi saling memanfaatkan dan ketergantungan (interdependensi) yang secara terus menerus dipelihara, direproduksi, dan dimantapkan dalam kehidupan masyarakat.

petani Rengas seiring dengan semakin besarnya porsi pemberitaan oleh media dan perhatian masyarakat.

Pembingkaiian keterlibatan pihak yang mendukung petani dari aktor non petani dalam memobilisasi potensi sumberdaya sosial politik yang berkembang menjadi gerakan petani Rengas sampai pada titik kulminasinya setelah peristiwa bentrokan. Perjuangan petani Rengas mulai memasuki fase kolektif terorganisir ditandai dengan kehadiran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) mengunjungi Desa Rengas, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, pada 30 Desember 2009. Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya SPI melakukan aksi massa bersama petani Desa Rengas, di Kantor DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumsel, dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, 28-29 Desember 2009. Aksi massa yang berjumlah 1000 orang ini berjalan beriringan dari Gedung Olah Raga Sriwijaya Palembang menuju gedung DPRD Sumsel. Mereka menuntut DPRD segera mengaudit PTPN VII yang diduga kuat telah merugikan negara, karena PTPN VII disinyalir telah mengusahakan perkebunannya di luar izin Hak Guna Usaha (HGU) yang telah ditetapkan secara nasional. Mereka juga mendesak kepada kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk mengaudit keberadaan usaha PTPN VII.

Konsolidasi petani Rengas terjadi ketika warga dan petani Rengas yang sudah melebur menjadi petani Rengas mengutarakan keinginan besar untuk bergabung dengan SPI Sumsel, mengikuti arahan dari SPI dan WALHI di Palembang. Sejak pernyataan warga Rengas berikrar bergabung dengan SPI dan WALHI maka setiap aktivitas perjuangan warga Rengas selalu diadvokasi dan didampingi oleh SPI dan WALHI, meskipun belum terbentuk basis struktur organisasi di desa Rengas. Dari pihak ketiga ini yang mendukung perjuangan dan aktivitas warga dan petani Rengas adalah Walhi, LBH Palembang, sementara Pemprov Sumsel dan Pemkab OKI, khususnya sejak 1998,⁴ memberi dukungan dalam bentuk regulasi administratif khususnya tentang

⁴Terkait dengan status kepemilikan tanah warga Rengas, maka pemerintahan daerah Sumatera Selatan, pada tanggal 1 September 1999 telah mengirim surat kepada Bupati Ogan Komering Ilir dan Direksi PTPN VII dengan nomer surat 593/4885/1999, dengan tegas pada poin 3 surat tersebut bahwa bila tidak tercapai kesepakatan pemerintah daerah tingkat I Sumatera-Selatan akan mengambil sikap tegas, bahwa tanah-tanah masyarakat yang dimaksud akan di-*enclave*, dikembalikan kepada masyarakat pemilik dan tidak dapat diusahakan lagi oleh PTPN VII dan selanjutnya kerugian masyarakat selama 17 tahun agar diselesaikan melalui jalur hukum.

proses ganti rugi, alas hukum batas tanah dan luas lahan yang mendapat HGU.⁵ Adapun partai politik memberikan dukungan sesuai dengan arah “kepentingan” dan lebih banyak melihat momentum.

Sampai beberapa tahun berikutnya konflik ini tak kunjung menemukan titik temu. Pada awal 1-6 Juli 2012, sebanyak 600 orang petani dari 20 desa itu melakukan unjuk rasa di berbagai kementerian dan lembaga terkait di Jakarta, salah satunya Kementerian BUMN dan Badan Pertanahan Nasional. Para petani memprotes luasan tanah yang digunakan oleh PTPN VII yang dirasa melebihi luas tanah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut para petani, lahan yang dikuasai PTPN VII di 21 desa, Kabupaten Ogan Ilir mencapai 21 ribu hektare, tetapi dari jumlah itu diketahui hanya 6 ribu ha yang memiliki HGU dan selebihnya sekitar 15 ribu ha tidak memiliki HGU sesuai yang diklaim petani sebagai lahan milik mereka.

Namun, aksi ini tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan, bentrok susulan semakin sering terjadi. Berselang seminggu kemudian pada 17 Juli, terjadi bentrokan antara petani Ogan Ilir yang tergabung dalam Gabungan Petani Penasak Bersatu (GPPB) dengan Brimob. Kejadian ini dipicu penghadangan dan pembakaran satu unit traktor milik PTPN VII unit Cinta Manis, sekitar pukul 09.00 oleh enam orang tak dikenal. GPPB dan Walhi menduga, pembakaran ini aksi disengaja yang dibuat untuk mendiskreditkan petani Ogan Ilir. Respon dari aparat pun semakin keras, pada 27 Juli 2012, pasukan Brimob yang membawa senjata lengkap dengan mengendarai sedikitnya tujuh unit mobil truk mendatangi Desa Limbang Jaya. Dalam kejadian tersebut, para petani mengalami tindakan kekerasan dari aparat, serangkaian penembakan diarahkan ke arah petani sehingga menyebabkan jatuhnya korban.

Setelah sekian lama berada dalam kondisi perseteruan, terjadi perubahan budaya dan perilaku yang dialami oleh warga desa. Warga desa menjadi cenderung sangat

⁵Bahkan, pada tanggal 28 Nopember 2000 dikeluarkan surat nomor: 593.83/6623/1/2000 dan tanggal 15 Januari 2001 surat nomor 593.83/0716/2001 dari Gubernur Sumatera-Selatan, Rosihan Arsyad, dan Bupati Ogan Komering Ilir yang isinya meminta kepada kementerian BUMN dan PTPN VII agar mengembalikan lahan warga secepatnya dan memberikan kompensasi atas penggunaan lahan warga selama 27 tahun. Di tahun 2003 bukti kuat atas lahan milik warga Rengas semakin kuat lagi dengan adanya dokumen berita acara TIM 9 (pembebasan tanah) tentang pembayaran ganti rugi hanya 825 Ha dari yang diklaim PTPN VII seluas 2.354 Ha. Pada inilah warga secara bersamaan mengadakan pengukuran sendiri secara manual atas lahan yang disengketakan. surat perintah Gubernur dan Bupati OKI terhadap tanggal 15 januari tahun 2001 secara eksplisit dan jelas surat bernomor: 593.83/0716/1/2001 meminta kepada Kementerian BUMN dan PTPN VII agar mengembalikan lahan warga secepatnya dan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan warga.

tertutup dan terkesan waspada dan cenderung mencurigai setiap kedatangan orang asing yang masuk ke desa mereka. Sebelumnya warga desa terutama laki-laki sangat terbiasa berada di luar rumah hingga tengah malam. Tidak banyak kegiatan yang dilakukan memang saat malam hari, mereka hanya berkumpul di balai-balai depan rumah dan berjaga-jaga untuk keamanan desa. Budaya berkumpul ini pun menciptakan rasa aman bagi warga desa. Sementara itu, ibu-ibu yang sebelumnya berprofesi sebagai pengerajin dan penenun kain. Kini mereka cenderung tidak lagi aktif memproduksi kerja di rumah, lebih memilih mengurung diri, tertutup di rumah atau malah merasa aman jika berkumpul dengan para tetangga untuk saling menjaga antar satu warga dengan warga lain. Ibu-ibu yang seharusnya memiliki kegiatan rumah tangga, dan ikut membantu keuangan rumah menjadi cenderung lebih pasif.

Ketidaknyamanan warga ditambah dengan semakin banyaknya orang luar masuk, disebabkan setelah peristiwa kekerasan, desa mereka menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari awak media, tim penyidik kepolisian sampai pada kunjungan-kunjungan orang yang memiliki kepentingan lainnya. Apalagi setelah seringkali aparat Brimob mendatangi warga desa, warga lebih memilih berada di dalam rumah. Sehabis ibadah sholat isya', jalan-jalan di desa sudah sepi. Tak lagi ada, warga yang berkumpul di luar rumah, tak ada lagi ada warga yang berani keluar rumah. Ketegangan sosial ini cenderung menciptakan kondisi mencekam di desa. Selain itu, warga mulai mehidupkan sistem keamanan mereka sendiri dalam menghadapi kondisi terburuk akibat konflik tersebut. Seperti yang terjadi saat kedatangan ratusan polisi Brimob, warga menabuh beduk di Masjid sebagai *alarm system* untuk warga lainnya. Tabuhan beduk menjadi tanda dengan tiga makna, yakni tabuhan karena telah terjadi kebakaran, pencurian atau kedatangan polisi memasuki desa. Begitu beduk ditabuh bertalu-talu, serentak warga berkumpul dan bersiap menghadapi rombongan aparat Brimob.

Pembangunan jejaring solidaritas juga digarap serius oleh para petani. Pada 8-10 Februari 2013, dua orang petani Rengas mewakili serikat petani di Ogan Ilir untuk menghadiri Kongres Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA) di Bantul, Yogyakarta. Pada kongres tersebut berkumpul perwakilan kelompok-kelompok petani yang tengah mengalami konflik, baik dengan pihak korporasi, negara, bahkan perebutan tanah dengan pihak militer. Di sana perwakilan petani dari Rengas, seperti perwakilan

petani lainnya, mempresentasikan kasus yang mereka alami serta menguraikan bagaimana kondisi yang dihadapi petani Rengas saat itu.

***Contentious Politics* dan Ketegangan Struktural**

Kondisi ketegangan struktural agraria yang menjadi sumber utama munculnya gerakan petani (meskipun dipahami tidak secara otomatis sebagai sebab) yang di dalamnya juga sudah muncul aksi-aksi kolektif petani. Temuan ini diposisikan sebagai basis akumulasi sumber daya potensi petani yang diwujudkan dalam penguatan struktur mobilisasi sumberdaya dalam gerakan sosio-politik petani Rengas terhadap PTPN VII Cinta Manis. Dalam konteks ini, gerakan petani Rengas terdiri atas struktur sumberdaya mobilisasi yang selalu dikonstruksi oleh para aktor terlibat untuk mencapai tujuan-tujuannya, baik tujuan jangka pendek (sosio-politik) maupun jangka panjang (sosio-kultural).

Bila melihat kategori unsur-unsur munculnya suatu gerakan sosial model mobilisasi Charles Tilly yang meliputi beberapa unsur yakni *organisasi, interest, repression, power, opportunity or threat dan collective action*. Faktor utama untuk memobilisasi massa dalam kasus konflik Rengas ini adalah organisasi sebab ketertarikan petani untuk berhimpun yang kemudian menjadi potensi berhubungan dengan “lawan”, yang kemudian membuka peluang ketersediaan ruang untuk melakukan interaksi dengan pihak lainnya adalah suatu cara memaksimalkan peluang yang akan dijadikan sasaran perjuangan. Pada proses ini yang terjadi sesungguhnya adalah suatu gerakan perlawanan balik dari petani (*reclaim atau counter claim*) terhadap dominasi kekuasaan.

Politik perlawanan dimainkan peranannya sebagai bentuk memobilisasi gerakan perlawanan. Karenanya, untuk sampai pada gerakan perlawanan, maka upaya mobilisasi massa itu harus memperhatikan faktor kesempatan dan ancaman atau situasi ketegangan struktural (*repertoire of contention*). Maksud Tilly dan Wood⁶ adalah sebagai bentuk perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan melalui berbagai ragam protes publik, termasuk tindakan-tindakan di luar jalur partisipasi politik formal yang diatur oleh hukum dan

⁶Charles Tilly dan Lesley J. Wood, *Social Movements, 1768-2008*, USA: Paradigm Publishers, 2009.

perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah yang signifikan.

Contentious politic dapat menjelaskan bahwa bagaimana perlawanan yang dilakukan secara tindakan kolektif bertujuan mengubah suatu kondisi sosial politik tertentu. Untuk mencapai tujuan perubahan tersebut, maka seorang aktor atau pemimpin gerakan perlawanan memiliki peluang dan kesempatan didalam mendayagunakan sejumlah potensi yang ada dilingkungan sekitar ketegangan-ketegangan tersebut atau *framing processes*. Pemetaan sejumlah potensi nilai-nilai lokal seperti: lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi lokal, dan jaringan pendukung lainnya diaktivasi melalui aktivitas kolektif yang ada dan digunakan untuk memobilisasi suatu gerakan perlawanan (*mobilization structured*). Upaya tersebut harus memperhatikan peluang dan ancaman atau situasi lingkungan yang ada didalam ketegangan-ketegangan yang terjadi, karenanya pembacaan situasi ketegangan tersebut harus melihat aktivitas kontrol sosial yang dilakukan oleh pihak lawan. Situasi tersebut dipahami sebagai *the repertoire of contentious*. Dari sinilah akan terjadi cara berinteraksi dan bagaimana orang-orang berada dalam form perlawanan berinteraksi dalam pertikaian politik (*contentious interaction*).⁷

Menurut Tarrow,⁸ tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan. Tindakan kolektif biasa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembagakan ataupun cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang yang bergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang yang berada diluar struktur.

Dalam pandangan Tarrow dan Tilly bahwa gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya kenyataan tindakan ketidakadilan dan sikap

⁷Sebagian analisis ini diambil dari penjelasan Mustain, *op-cit*,hal:90

⁸Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*, 2nd ed.: Cambridge University Press, 1998.

sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Gerakan Sosial merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan dan didukung adanya peluang dan kesempatan politik bukan sekedar dukungan dari pihak-pihak yang mengalami penindasan, teraliansi dan terisolir dalam masyarakat.⁹

Di dalam perubahan tersebut warna kepentingan, kepercayaan, organisasi, kepemimpinan, ideologi keyakinan dan kemampuan masing-masing memberikan kontribusi nyata dalam perubahan identitas perjuangan. Ini terlihat pada elemen dasar perlawanan yang bersumber dari kenyataan ketidakadilan dan ancaman hilangnya sumber ekonomi warga Rengas. Bagi warga Rengas tanah merupakan sumber kehidupan dan sumber daya rumah tangga, karena itu petani berjuang untuk melindungi kepemilikannya atas tanah dengan cara aksi-aksi kolektif dan membangun solidaritas di dalamnya.

Dari hasil pengkajian data di lapangan ditemukan tiga elemen utama saling terkait yang mendorong tingkat perlawanan dari aksi-aksi kolektif petani di antaranya: struktur peluang politik dan proses politik, mobilisasi, dan pemingkanaan kolektif. Maksud dari struktur peluang politik dimaknai sebagai derajat keterbukaan politik yang memungkinkan dilakukannya aksi-aksi kolektif petani sebagai proses politiknya. Sedangkan struktur mobilisasi sumberdaya merupakan proses di mana suatu organisasi gerakan petani yang diciptakan dapat menjamin kontrol kolektif terhadap sumberdaya material dan non material.

Bila melihat kategori unsur-unsur munculnya suatu gerakan sosial model mobilisasi Tilly yang meliputi beberapa unsur yakni *organisasi, interest, repression, power, opportunity or threat dan collective action*. Faktor utama untuk memobilisasi massa dalam kasus konflik Rengas ini adalah organisasi sebab ketertarikan petani untuk berhimpun yang kemudian menjadi potensi berhubungan dengan “lawan”, yang kemudian membuka peluang ketersediaan ruang untuk melakukan interaksi dengan pihak lainnya adalah suatu cara memaksimalkan peluang yang akan dijadikan sasaran perjuangan. Pada proses ini yang terjadi sesungguhnya adalah suatu gerakan

⁹ *Ibid.*

perlawanan balik dari petani (*reclaim atau counter claim*) terhadap dominasi kekuasaan.

Charles Tilly¹⁰ melihat bahwa mobilisasi secara kolektif meliputi organisasi, interest, peluang atas ancaman dan kemampuan kelompok dalam menghadapi represi atau kontrol sosial. Aspek interest (kepentingan) terkait dengan persoalan ekonomi dan kehidupan politik, aspek organisasi terkait dengan *well defined groups*¹¹ dan aspek represi terkait dengan kemampuan memaksimalkan peluang dan ancaman yang saling berhadapan dengan interest yang ada.

Teori mobilisasi sumber daya Tilly ini lebih melihat bahwa munculnya gerakan sosial karena tersedianya faktor-faktor pendukungnya seperti adanya sumber-sumber pendukung, tersedianya kelompok koalisi dan adanya dukungan sumber daya potensial lainnya seperti tekanan dan upaya pengorganisasian secara terstruktur. Hal lain yang juga penting adalah ideologi. Akan tetapi, Tilly memberi batasan bagi ruang gerakan mobilisasi dalam tindakan massa yakni selalu dikaitkan dengan alat-alat produksi yang menjadi arena konflik kepentingan, diantara alat produksi tersebut adalah : tanah, buruh kerja, modal capital dan teknologi. Dalam studi mengenai konflik Rengas ini yang menjadi sumber kepentingannya adalah tanah yang dikelola dan dikuasai oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dalam kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.

Struktur mobilisasi sumberdaya terwujud dalam meluasnya jaringan (struktur) dan isu-isu yang membentuk kekuatan struktur gerakan. Bertemunya solidaritas, komitmen yang diintegrasikan oleh organisasi akan membuahkan teokrasi, seperti yang didefinisikan oleh Charles Tilly yang melihat "*extensive integration of trust networks around communities of beliefs*". Tilly menegaskan bahwa tingkat keorganisasian,

¹⁰*Ibid.*, h. 56

¹¹Bagi Tilly aspek organisasi menjadi prasyarat bagi terciptanya suatu tindakan kolektif, sebab organisasilah yang kemudian bertugas untuk mengelolah interest ke dalam proses mobilisasi massa.

sebagai aspek yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat mobilisasi, ditentukan oleh *group inclusiveness*, atau kohesi/solidaritas sosial dan diperkuat oleh kehadiran “keyakinan”.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa paling tidak ada tiga unsur utama saling terkait yang mendorong keberhasilan aksi-aksi kolektif petani di Rengas, yaitu struktur peluang politik dan struktur mobilisasi, pembingkaiannya kondisi-kondisi ketegangan struktural yang terus-menerus dan perubahan dari tindakan kolektif ke serikat petani Rengas dengan memaksimalkan sumberdaya organisasi. Hal ini menggambarkan perubahan strategi perjuangan dari tindakan kolektif ke kolektif terorganisir adalah suatu kolektivitas tindakan petani diaktivasi oleh berbagai aktivitas institusi, organisasi lokal dan nasional yang ada dan mendukung perjuangan petani dan narasi keyakinan terhadap iman. Fakta menunjukkan bahwa kalimat-kalimat *Allahu Akbar, Fii Sabillillah, La ilaah illa Allah*, merupakan unsur penyatu dan penguat nilai perjuangan untuk mencapai tujuan perubahan tersebut.

Gerakan Petani Rengas dalam studi ini secara khusus menunjuk pada “gerakan petani”, yakni sebagai gerakan sosial terdiri atas aktor petani dan non petani yang membingkai isu atau mengusung agenda perubahan tatanan agraria dengan basis massa utamanya adalah petani. Gerakan Petani Rengas muncul sebagai akumulasi pemanfaatan kesempatan politik dan ketersediaannya sumber-sumber daya seperti dukungan massa, koalisi, demonstrasi, kepemimpinan, media dan ideologi. Adapun maksud dari “ideologi” dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu kesatuan perasaan dan komitmen kesadaran bahwa petani Rengas sadar dan memahami persoalan yang sedang mereka hadapi dan membangun solusinya.

Pada tingkat keorganisasian gerakan itu menunjukkan sebagai suatu realitas sosial sebagai identitas bersama dan jejaring menyatukan para anggota kelompok yang berwujud pada *group inclusiveness*. Teori mobilisasi struktur menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial membutuhkan sebuah organisasi baik terlembaga atau tidak terlembaga yang memiliki sebuah struktur yang mudah untuk dimobilisasi. Teori ini menekankan jika *agents* atau aktor mampu memobilisasi struktur organisasi, maka gerakan sosial akan sukses. Organisasi gerakan adalah *wahana* atau kendaraan bagi terwujudnya cita-

cita sosial yang diinginkan. Melalui organisasi gerakan, akan terwujud upaya mobilisasi massa dan pendidikan kepada massa terhadap kondisi ekonomi politik yang mereka alami.

Sementara itu, komponen ideasional, yaitu identitas kolektif. Maksudnya adalah pemahaman seseorang atau bersama mengenai siapakah kita dan siapakah orang lain, dan sebaliknya, pemahaman orang lain mengenai diri mereka dan orang-orang di luar mereka. Identitas kolektif dan saling ketergantungan berhubungan secara multiplikatif, di mana keberadaan keduanya secara bersama-sama berimplikasi positif terhadap tingkat keorganisasian. Sebab, tindakan kolektif yang terbungkus baik oleh organisasi akan membentuk suatu jaringan dan *trust networks*. Perkawinan antara komitmen bersama dengan integritas dalam suatu wadah organisasi tersebut akan menghasilkan “teokrasi” perjuangan, yang didefinisikan oleh Tilly sebagai “*extensive integration of trust networks around communities of beliefs*”.¹²

Dalam konteks ini gerakan perlawanan petani Rengas tidak saja diideasionalkan oleh kekuatan-kekuatan sipil organik dan elemen mobilisasi sumber daya seperti kepentingan dan organisasi, tetapi juga suatu pembentukan keyakinan yang muncul dan menyebar kuat sebagai narasi gerakan, yakni: kalimat-kalimat “*Allahu Akbar, Fii Sabillillah*”, narasi-narasi keagamaan tersebut merupakan simbol pernyataan bahwa tujuan perjuangan dari gerakan perlawanan petani Rengas bukan berhenti pada kepentingan kembalinya hal lahan mereka semata, tetapi memperjuangkan hak kemanusiaan secara universal yakni hak para petani tertindas.

Daftar Pustaka

- Coser, Lewis A. *The Functions of Sosial Conflict*. New York : The Free Press. 1956.
----- . *Men of Idea: A Sociologist's View*, New York, The Free Press. 1970
Taylor, S.J., Bogdan, R. *Introduction to Qualitative Reserach Methods: The Search for Meaning* (2nd ed.). New York : John Wiley & Sons. 1984.

Tilly, Charles. *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House. 1978.
----- . *Popular contention in Great Britain, 1758-1834*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1995
----- . *To Explain Political Process*. The American Journal of Sociology. 1995.

¹² Tilly, “Trust and Rule”, *Theory and Society*, Vol. 33, No. 1, 2004, h. 1-30.

----- . *Processes and Mechanism of Democratization*. Sociological Theory, Vol. 18, No. 1, 1-16.. 2000.

----- . “Social Movement and National Politics”, dalam C. Bright and Sandra Harding (eds.), *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*. Ann-Arbor, Michigan: University of Michigan Press. 2009.

Tilly, Charles and Sydney Tarrow. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press. 2008.

Tilly, Charles and Lesley J. Wood. *Social Movements, 1768 – 2008*. Paradigm Publishers. 2009.